**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**(PSAK No.16) ATAS ASET TETAP PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVRE II SUMBAR**

*Analysis Of The Application Of Financial Accounting Standards (PSAK No. 16) On Fixed Assets In The PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat*

**Arnes Putra, Yulia Syafitri**

Program Studi Akuntansi, Ekonomi, Universitas Ekasakti

Jln. Veteran Dalam No. 26 B, Padang (25113), Indonesia

E-mail : *arnes.putra@gmail.com*

***Abstrak***

Peran aset tetap dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan cukup besar, selain itu nilai investasi yang ditanamkan pada aset tetap relatif besar. oleh karena itu, kesalahan dalam menilai aset tetap akan mengakibatkan kesalahan material. Sehingga dalam pencatatan dan pemanfaatan aset tetap, manajemen perlu mengikuti standar yang tertulis dalam PSAK No. 16 yang mengatur terkait dengan pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah akuisisi, penyusutan, penghentian dan penyajian aset tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aset tetap. Aktiva tetap akuntansi untuk pengakuan pengukuran, pengeluaran, penyusutan penghentian dan penyajian serta pengungkapan pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat. Pengujian dilakukan dengan menganalisis sejauh mana PT. KAI Sumatera Barat telah menerapkan kebijakan akuntansi aset tetap sesuai dengan PSAK No. 16 dalam kegiatan PT. KAI Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Artinya untuk mendeskripsikan secara menyeluruh kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan penyajian aset tetap sebagai bagian dari praktik telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PSAK No. 16.

Kata Kunci: Aset Tetap, PSAK No. 16***.***

***Abstrak***

*The role of fixed assets in supporting the company's operational activities is quite large, besides the value of investments invested in fixed assets is relatively large. therefore, errors in valuing fixed assets will result in material errors. So that in recording and utilizing fixed assets, management needs to follow the standards written in PSAK No. 16 which regulate related to recognition, measurement, expenditure after acquisition, depreciation, termination and presentation of fixed assets.This study aims to analyze the application of fixed asset accounting for the recognition of measurement, expenditure, depreciation of termination and presentation and disclosure at PT. KAI (Persero) Divre II West Sumatra. Testing is done by analyzing the extent to which PT. KAI West Sumatra has implemented a fixed asset accounting policy in accordance with PSAK No. 16 in the activities of PT. KAI West Sumatra. This study uses qualitative analysis methods. That is to thoroughly describe the fixed asset accounting policies that are applied to PT. KAI (Persero) Divre II West Sumatra. Secondary data sources were obtained from the literature related to this thesis research. The results of this study indicate that the recognition, measurement, depreciation, termination and presentation of fixed assets in part of the practice is in accordance with the rules contained in PSAK No. 16.*

***Keywords****: Fixed assets, PSAK No. 16.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Setiap perusahaan di dalam kegiatan operasionalnya memerlukan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang dimiliki perusahaan digunakan untuk dapat menghasilkan output yang baik berupa barang maupun jasa. Salah satu faktor-faktor produksi tersebut adalah aset. Aset merupakan bentuk dari penanaman modal perusahaan, yang berupa harta kekayaan atau hak atas kekayaan atau jasa yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan. Salah satu aset yang memegang peranan penting adalah aset tetap, yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan operasional perusahaan.

Aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Yang dapat dimasukkan ke dalam kolom aset salah satunya adalah gedung atau bangunan. Jadi kalau suatu perusahaan memiliki gedung senilai satu miliar rupiah, maka asset yang dihitung adalah satu miliar rupiah itu. Selain gedung, yang bisa dihitung sebagai aset bisa termasuk: merk dagang, paten teknologi, uang kas, mobil, dll. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Aset>).

Aset dipahami sebagai harta total. Namun biasanya untuk keperluan analisis dirinci menjadi beberapa kategori, seperti:

1. [Aset lancar](https://id.wikipedia.org/wiki/Aset_lancar%22%20%5Co%20%22Aset%20lancar)
2. [Investasi jangka panjang](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Investasi_jangka_panjang&action=edit&redlink=1%22%20%5Co%20%22Investasi%20jangka%20panjang%20(halaman%20belum%20tersedia))
3. [Aset tetap](https://id.wikipedia.org/wiki/Aset_tetap%22%20%5Co%20%22Aset%20tetap)
4. [Aset tidak berwujud](https://id.wikipedia.org/wiki/Aset_tidak_berwujud%22%20%5Co%20%22Aset%20tidak%20berwujud)
5. [Aset pajak tangguhan](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aset_pajak_tangguhan&action=edit&redlink=1%22%20%5Co%20%22Aset%20pajak%20tangguhan%20(halaman%20belum%20tersedia))
6. [Aset lain](https://id.wikipedia.org/wiki/Aset_lain%22%20%5Co%20%22Aset%20lain)

Daftar aset dalam [neraca](https://id.wikipedia.org/wiki/Neraca%22%20%5Co%20%22Neraca) disusun menurut tingkat likuiditasnya, mulai dari yang paling likuid hingga yang tidak likuid. Aset pada neraca disajikan pada sisi kiri secara berurutan dari atas ke bawah. Penyusunan neraca dimulai dari yang paling likuid (lancar), yaitu mulai dari aset lancar, aset tetap dan seterusnya. Komponen aset lancar menurut Kasmir sebagai berikut: “kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan sebagainya” (2012:31) Komponen aset tetap menurut Kasmir sebagai berikut: “Tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, dan lainnya” (2012:32). Berdasarkan teori di atas aset disusun secara berurutan dari mulai yang likuid sampai yang kurang likuid atau yang gampang dengan mudah diuangkan. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Aset>)

Aset tetap merupakan harta berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan bukan untuk dijual, melainkan membantu aktivitas operasional perusahaan serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap merupakan salah satu harta yang dimiliki oleh perusahaan yang nilainya cukup besar guna menunjang kelancaran kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Aset tetap dapat berupa tanah, gedung-gedung, mesin, kendaraan, perlengkapan serta peralatan lainnya. Perolehan aset tetap dapat ditempuh dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli tunai, membeli secara kredit, melalui pertukaran, sewa beli ataupun cara-cara lain.

Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan kebijakan akuntansi aset tetap yang berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16, agar diperoleh laporan keuangan yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan kepada para pemakai laporan keuangan. Melihat begitu besarnya peranan aset tetap dalam membantu kelancaran aktivitas operasional perusahaan, maka dibutuhkan suatu penerapan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No.16 (Revisi 2018) bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut.Masalah utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset tetap, perolehan aset tetap, biaya setelah perolehan, dan penyusutan nilai aset tetap. Dalam mendapatkan aset tetap maka perusahaan wajib akan mengeluarkan biaya perolehan yang digunakan memperoleh aset tetap, menurut PSAK No. 16 biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset tetap pada saat perolehan atau konstruksi jika dapat diterapkan, jumlah yang di distribusikan ke aset tetap pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu. Aset tetap selalu ada proses penyusutan dimana menurut PSAK No. 16 penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat dsusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.

PT. Kereta Api (Persero) Divre II Sumatera Barat adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan layanan jasa transportasi darat, dituntut untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis. Kereta Api merupakan alat transportasi yang merakyat, artinya dari mulai kalangan bawah, menengah sampai kalangan atas bisa menggunakan jasa transportasi ini. Keberadaan kereta api diharapkan bukan sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi sebagai alat angkut dan distribusi saja, tetapi lebih untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemakai jasa kereta api, dengan memberikan kenyamanan, keamanan dan ketepatan waktu.

Dalam penetapan umur ekonomis aset tetap dan tarif penyusutan aset tetap ditentukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat, sehingga PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat tidak mempunyai wewenang untuk ikut andil dalam penetapan umur ekonomis suatu aset tetap dan tarif penyusutan aset tetap. PT. Kereta Api (Persero) Divre II Sumatera Barat hanya menjalankan perintah sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Pusat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang“**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.16) Atas Aset Tetappada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat**” sebagai judul Skripsi.

**Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah ;

1. Untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumbar.

2. Untuk mengetahui Apakah Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat telah sesuai PSAK No. 16.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Pengertian Aset Tetap Menurut PSAK No.16**

Pengertian aset tetap menurut IAI, PSAK No 16 (Revisi 2018) adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang/ jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Sedangkan Marisi (2013:2) mendefinisikan aset tetap adalah aset yang memiliki wujud fisik dan memberikan manfaat ekonomi kepada entitas pada masa-masa yang akan datang.

Beberapa definisi aset tetap yang dikemukakan oleh beberapa ahli di bidang akuntansi maupun lembaga profesi akuntansi, seperti yang diuraikan dibawah ini:

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 (Revisi 2018) paragraf 6 Ikatan Akuntansi Indonesia (2015:16.1), dinyatakan :

“Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang ataujasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan administratif; dan.diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”

**Perolehan dan Pengakuan Aset Tetap**

Rudianto (2014:274) menyatakan bahwa untuk memperoleh aset tetap, Perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang yang tidak hanya dipakai untuk membayar barang itu sendiri sesuai dengan nilai yang tercantum didalam faktur, tetapi juga untuk beban pengiriman, pemasangan, perantara, balik nama dan sebagainya. Keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut disebut dengan harga perolehan.

PSAK No 16 (2018:16.4) mengemukakan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset tetap jika dan hanya jika :

1. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut.
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

**Biaya-biaya Setelah Perolehan**

Kieso et al (2014:25-26) menyatakan bahwa secara umum, terdapat empat jenis pengeluaran utama yang berkaitan dengan aset yang ada yaitu

1. Penambahan
2. Perbaikan dan Penggantian
3. Biaya Penyusunan Kembali dan Pemasangan Kembali (*rearrangement and reinstallation costs*)
4. Reparasi biasa *(ordinary repairs)*

**Penyusutan Aset Tetap**

Dalam menentukan umur manfaat dari suatu aset, faktor-faktor yang diperhitungkan antara lain :

* 1. Ekspektasi daya pakai dari aset. Daya pakai dinilai dengan merujuk pada ekspektasi kapasitas atau keluaran fisik aset.
	2. Ekspektasi tingkat kehausan fisik, yang bergantung pada faktor pengoperasian aset.
	3. Keuangan teknis dan keuangan komersial yang diakibatkan oleh perusahaaan atau peningkatan produksi, atau karena perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh aset,
	4. Pembuatan hukum atas penggunaan aset.

Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus *(Straight Line Methode)*, metode saldo menurun *(Declining Balance Method)*, dan jumlah unit *(Sum of the unit Method)*.

**Penyajian Aset Tetap di Neraca**

Secara umum aset tetap perusahaan disajikan dalam laporan keuangan yaitu pada komponen neraca, bentuk penyajian aset tetap di dalam neraca yang umumnya sering digunakan perusahaan adalah sebagai berikut:

* + Di neraca yang hanya mencantumkan nilai buku saja atau nilai *cost* aset tetap masing-masing dan kemudian dikurangi akumulasi penyusutan secara global.
	+ Informasi yang lebih lanjut dapat dibuat dalam catatan atas laporan keuangan. Di sini dapat dibuat nilai *cost* masing-masing dan akumulasi penyusutan masing-masing.
	+ Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.

**Penghentian Aset Tetap**

Menurut PSAK No. 16 (Revisi 2018) paragraf 67 Ikatan Akuntansi Indonesia (2018:16.11), menyatakan bahwa “Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya :

a. Pada saat pelepasan; atau

b. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya.”

**Pengungkapan Aset Tetap**

Berdasarkan *International Accounting Standard* No. 16 Tahun 2012 tentang aset tetap, pengungkapan aset tetap pada laporan keuangan, perusahaan diharuskan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap. Pemilihan metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset adalah hal-hal yang memerlukan pertimbangan. Pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam mengulas kebijakan yang dipilih manajemen dan memungkinkan perbandingan dengan entitas lain. Untuk aset tetap, pengungkapan tersebut dapat muncul dari perubahan estimasi dalam nilai residu, estimasi biaya-biaya, umur manfaat dan metode penyusutan yang digunakan.

**Penelitian Sebelumnya**

Kebijaksanaan perlakuan akuntansi aset tetap yang ada dan dimiliki PT Liba Marindo yang diterapkan seperti sekarang ini, menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak wajar, sehingga pengambilan keputusan ekonomi oleh pemakai yang mengandalkan laporan keuangan sebagai sumber informasi menjadi tidak akurat.

**METODE PENELITIAN**

**Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh informasi yang sebaik- baiknya dengan asumsi agar sasaran dalam penulisan dapat tercapai, maka penulis akan menggunakan metode Studi Dokumen yaitu metode pengumpulan data yang tidak di tujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

**Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data cara Studi kepustakaan yaitu Penulis mengumpulkan data teoritis yang menjadi landasan teori untuk melaksanakan penelitian ini dengan cara mempelajari berbagai buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini.

**Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen- dokumen yang berkaitan dengan pembahasan dari luar perusahaan, seperti buku-buku atau referensi lain yang mendukung dalam penulisan ini. Data yang diperoleh yaitu dari Laporan Aset Tetap, Nominatif Aset Tetap.

**Defenisi Operasional Variabel**

Menurut PSAK 16 (Revisi2018) asset tetap adalah

Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset tetap adalah aset yang memiliki wujud fisik dan memberikan manfaat ekonomi kepada entitas pada masa-masa yang akan datang.

1. Harga perolehan
2. Penyusutan
3. Penyajiannya dineraca
4. Penghentian Aset Tetap
5. Pengungkapan

**Metode Analisis**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis :

* 1. Untuk permasalahan pertama ini digunakan analisa deskriptif yaitu mempertemukan antara teori yang dikumpulkan dengan penerapan yang terjadi pada perusahaan, mempelajari dan menganalisanya.
	2. Untuk permasalahan yang kedua digunakan uji tanda yaitu memberikan tanda + (positif) jika Aset Tetap PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat sesuai dengan PSAK No.16 dan memberikan tanda – (negatif) jika tidak sesuai.

**Metode Pengujian Hipotesis**

Untuk mengetahui sesuai/ tidak sesuainya Aset Tetap pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat dengan PSAK No.16 maka penulis akan menguji dengan membandingkan antara h-hitung dengan h-tabel berdasarkan taraf/ tingkat kesalahan (α)= 5% h-hitung dapat ditentukan berdasarkan jumlah dari tanda yang terjadi paling sedikit/ terkecil. Pengujian hipotesis yang dapat dipakai untuk menguji sebagai berikut

Menurut Agussalim Manguluang dalam buku Statistik (2013,107) Ho: X = 0 tidak terdapat kesesuaian antara Penerapan Aset Tetap pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumbar dengan PSAK No.16 dengan taraf nyata kesalahan (α)= 5% kemudian Ha : ≠ 0 terdapat kesesuaian antara Penerapan Aset Tetap PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumbar dengan PSAK No.16 dengan taraf nyata kesalahan (α)= 5%

Perbandingan antara h-hitung dengan h-tabel untuk menentukan nilai antara tanda positif (+) dengan tanda negatif (-), h-hitung digunakan ketentuan pada nilai perbandingan yang terkecil dengan h-tabel berdasarkan uji tanda dengan ketentuan yang digunakan adalah :

Ho tidak ada perbedaan Penerapan Aset Tetap menurut PSAK No.16 dengan Penerapan Aset Tetap pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat.

Ha terdapat perbedaan Penerapan Aset Tetap menurut PSAK No.16 dengan penerapan aset tetap pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumbar.

Tolak Ho dan menerima Ha : apabila h-hitung ≤ h-tabel dan sebaliknya tolak Ha dan menerima Ho apabila h-hitung ≥ h-tabel .

Ho = tanda (-) = adanya perbedaan Penerapan Aset Tetap PSAK No. 16 dengan Penerapan Aset Tetap pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumbar.

Ha = tanda (+) = adanya persamaan Penerapan Aset Tetap PSAK No. 16 dengan Penerapan Aset Tetap pada PT. Kereta Api Indonesia ( Persero) Divre II Sumbar.

**Hasil Penelitian**

**Penggolongan Aset Tetap**

Dalam kebijakan akuntansinya, PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat menetapkan kelompok aset tetapnya menjadi sebagai berikut

* 1. Tanah

Meliputi tanah yang dimanfaatkan dan dikuasai PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan operarasionalnya yang terdiri dari 2(dua) kapling tanah seluas : 21.399 M2.

* 1. Peralatan dan mesin

Meliputi mesin pemotong rumput, mesin pemadam kebakaran, Bak cadangan air/ menara air, Infocus, kamera, tiang bendera, kulkas, kendaraan roda empat, genset, AC, mesin air dan peralatan lainnya.

* 1. Gedung dan bangunan

Gedung meliputi tempat kerja, gedung properti, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, jalan rel, jembatan, terowongan, listrik, jalan khusus, sinyal listrik dan lain-lain sejenisnya.

**Penerapan Akuntansi Pengukuran Aset Tetap**

 Suatu aset akan dimiliki oleh PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat yang didahului dengan diterbitkannya 2/KU.308/KA-2012 untuk dapat melaksanakan pengeluaran kas, dalam hal ini digunakan untuk memperoleh suatu aset. Dengan demikian, aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan yaitu sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Apabila penilaian aset tetap dengan mengunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap akan didasarkan pada harga perolehan yangdiestimikasikan. Dalam hal ini, nilai aset tetap tersebut akan dicatat sebesar nilai wajar aset yang bersangkutan.

 Pada dasarnya, proses pengakuan suatu aset mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada pengukuran yaitu meliputi definisi, apakah suatu aset telah memenuhi defisini untuk dapat disebut sebagai aset tetap bedasrkan kriteria-kriteria yang diterapkan dalam standar akuntansi keuangan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam proses pengukuran tersebut mencakup masalah pengukuran yaitu berhubungan dengan pengakuan aset tetap yang berkaitan dengan unsur waktu diakuinya suatu aset menjadi memiliki entitas. Hal yang menjadi titik berat pada pengakuan adalah unsur waktu yakni kapan suatu aset menjadi milik entitas yang berasangkutan. Suatu aset yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Untuk dapat disajikan dalam laporan keuangan, aset tetap harus dapat diukur dengan nilai uang. Dengan demikian, informasi nilai aset tetap akan lebih tepat dan dapat diandalkan.

**Penerapan Akuntansi Pengakuan Aset Tetap**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.16 di atas, suatu aset dapat diakui menjadi milik entitas apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung oleh bukti secara hukum. Secara umum, aset akan diakui menjadi milik entitas pada saat aset tersebut diperoleh entitas yang bersangkutan. Secara umum, pengakuan aset tetap yang dilakukan oleh PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat telah sesuai dengan penyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 .

**Perolehan Dengan Pembelian**

Pengakuan waktu suatu aset diakui sebagai aset tetap yang dilakukan PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No.16 yang menyatakan bahwa aset tetap akan diakui dan dicatat apabila telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah.

Transaksi yang terjadi akibat perolehan aset tetap pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat :

**Jurnal :**

* 1. Pembelian lokomotif guna operasional KAI Rp. 2.352.515.841

Aset Tetap 2.352.515.841

 Hutang 2.352.515.841

* 1. Pembelian kereta penumpang guna operasional KAI

Tanah 3.357.986.175

 Kas 3.357.986.175

Bedasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian awal aset tetap yang diperoleh dengan cara pembelian secara umum telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No.16. Biaya perolehan atas aset tetap yang diperoleh dengan cara pembelian adalah dicatat sebesar harga pembelian dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk aset tetap tersebut sampai dengan aset tersebut bisa digunakan. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16, aset yang diperoleh harus diakui pada saat aset tersebut diterima dan siap untuk digunakan sehingga terdapat kepastian akan adanya manfaat ekonomis yang akan diterima PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat di masa yang akan datang.

**Perolehan Secara Gabungan**

 Menurut pernyataan Strandar Akuntansi Keuangan No.7, paragraf 42 yaitu biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut bedasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Sementara itu, PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat memperlakukan aset yang diperoleh dengan cara gabungan dengan menghitung masing-masing aset, tidak bedasarkan nilai wajarnya tetapi dengan harga perolehan. Perlakuan ini kurang sesuai dengan ketentuan yang ada pada Standar Akuntansi Keuangan No.16.

**Perolehan Dengan Pertukaran**

Kebijakan akuntansi tentang aset tetap pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap dari pertukaran adalah dinilai sebesar nilai wajar. Seperti yang disebutkan dalam pernyataan Strandar Akuntansi Pemerintahan bahwa biaya perolehan aset yang diperoleh dengan pertukaran dinilai berdasarkan nilai wajar asset yang diperoleh yaiut ekuivalen dengan nilai tercapat aset yang lepas setelah disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang diserahkan.

 Pada tahun 2017 dilakukan penyusutan terhadap mesin yang digunakan sebagai operasional kegiatan kereta api dan pertukaran peralatan dengan sarana, berikut disajikan jurnalnya :

Sarana 98.657.208.449

Akumulasi Penyusutan Peralatan 60.047.514.128

Peralatan 38.609.694.339

 Laba Pertukaran Peralatan 120.095.028.238

**Aset Donasi**

Penilaian aset donasi yang berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau nilai pengganti telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 yang menyatakan bahwa aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Dalam memperlakukan aset tetap yang diperoleh dari donasi. Pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat, aset yang diperoleh berupa sumbangan dari pihak ketiga akan diterima dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau nilai pengganti. Aset tetap yang di peroleh dari donasi dicatat pada periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima.

**Perlakuan Akuntansi Terhadap Pengeluaran Setelah Perolehan**

Berhubungan dengan perlakuan atas pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan aset tetap tersebut, PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat mempunyai kebijakan bahwa setiap pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan ataupun perbaikan aset tetap akan langsung dicatat sebagai biaya pemeliharaan. Dalam kebijakan akuntansinya, PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat tidak membedakan antara pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan.

 Jadi semua pengeluaran setelah perolehan akan dicatat sebagai biaya tanpa memperhatikan apakah pengeluaran tersebut berupa pemeliharaan ataupun perbaikan yang mungkin bisa menambah masa manfaat aset yang bersangkutan. Biaya tersebut pada akhir periode akan dimasukkan dalam laporan perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

**Penerapan Akuntansi Penyusutan**

Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun

* 1. Nilai yang Dapat Disusutkan
	2. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap

Transaksi : Dilakukan penyusutan terhadap aset tetap yang digunakan, maka biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap dapat dijurnalkan sebagai berikut :

Biaya penyusutan lokomotif 2.441.514.304

Akumulasi penyusutan lokomotif 2.441.514.304

**Penerapan Akuntansi Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

Selama ini, PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat melakukan penghentian atau pelepasan aset tetap dengan 2 (dua) cara yaitu

* 1. Untuk barang – barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan dengan cara penjualan atau pelelangan. Hasil penjualan disetorkan ke kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
	2. Untuk barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan dengan cara pemusnahan yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan dari Panitia Pelelangan / Penjualan.

Aset tetap yang tidak mempunyai manfaat ekonomis di masa mendatang akan dihapus dan di eliminasi dari neraca. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16, suatu aset tetap akan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa mendatang.

**Pelaporan Aset Tetap pada PT. KAI**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pencatatan dan pelaporan aset tetap yang dilakukan oleh PT. KAI periode pelaporan tahun 2017 telah sesuai dengan **Standar Akuntansi Keuangan No.16**. Hal ini dikarenakan terdapatnya kesesuaian antara pencatatan dengan penyajian yang terdapat di dalam laporan keuangan.

 Pelaporan akuntansi aset tetap PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat telah dilakukan sesuai dengan PSAK No.16 baik dari segi pengakuan, perolehan dengan pembelian, perolehan dengan penggabungan, perolehan dengan pertukaran, aset donasi, penerapan akuntasi penyusutan, penerapan akuntansi penghentian dan penghapuasan aset tetap dan penerapan akuntansi atas pengungkapan aset tetap dalam arti perusahaan ini dalam menata laporan keuangannya telah berpedoman pada aturan berlaku.

**Penerapan Akuntansi atas Pengungkapan Aset Tetap**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan harus diungkapkan untuk masing – masing jenis aset tetap:

* + Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
	+ Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.
	+ Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

**Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat telah sesuai PSAK No. 16**

PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat telah mengungkapkan penilaian, penambahan, nilai penyusutan dan pelepasan aset tetap, termasuk dasar penilaian yang dugunakan untuk menentukan nilai tercatat, metode penyusutan yang di gunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode yang semuanya sesuai dengan ketentuan yang ada pada Standar Akuntansi Keuangan No.16.

**Pengujian Hipotesis**

**Tabel 4.1**

**Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No**  | **Penerapan SAK** | **Ket** |
| **SAK** | **PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat** |
| 123456789 | PengakuanPerolehan dengan PembelianPerolehan dengan PenggabunganPerolehan dengan pertukaran Aset DonasiPenerapan Akuntasi penyusutanPenerapan akuntansi penghentian dan penghapuasan aset tetapPenerapan akuntansi atas pengungkapan aset tetapPelaporan Aset Tetap | Sudah dilakukanSudah dilakukanSudah dilakukanSudah dilakukanSudah dilakukanSudah dilakukanSudah dilakukanSudah dilakukanSudah dilakukan | +++++++++ |

 Sumber : Data Diolah Sendiri, 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barattelah menerapkan akuntasi sesuai dengan PSAK No.16 baik dari segi Pengakuan, Perolehan dengan Pembelian, Perolehan dengan Penggabungan, Perolehan dengan pertukaran, Aset Donasi, Penerapan Akuntasi penyusutan, Penerapan akuntansi penghentian dan penghapuasan aset tetap dan Penerapan akuntansi ayas pengungkapan aset tetap.

Selain itu berikut disajikan perbedaan penerapan pada SAK dengan PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barattelah menerapkan akuntasi sesuai dengan SAK baik dari segi Pengakuan, Perolehan dengan Pembelian, Perolehan dengan Penggabungan, Perolehan dengan pertukaran, Aset Donasi, Penerapan Akuntasi penyusutan, Penerapan akuntansi penghentian dan penghapuasan aset tetap dan Penerapan akuntansi atas pengungkapan aset tetap.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

 Berdasarkan informasi yang berhubungan dengan praktek penerapan akuntansi yang dilakukan oleh PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat mulai dari penggolongan aset tetap sampai dengan pengungkapannya dalam laporan keuangan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

* 1. PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat mengelompokan aset tetap berdasarkan jenisnya. Pengelompokan aset tetap dalam kebijakan akuntansinya secara umum telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No.16.
	2. Secara umum, pengukuran aset tetap yang dilakukan PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat telag sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No.16. Menurut Standar Akauntansi Pemerintahan, pengukuran awal aset tetap di ukur berdasarkan biaya perolehan. Demikian pula, pengukuran aset tetap yang dilakukan PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat juga diukur berdasarkan biaya historis serta menggunakan jasa pihak ke tiga dalam penilaian aset kembali / Appraisal Penilaian BMD ( Barang Milik Daerah )
	3. Menurut PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat, aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aset aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No.16 bahwa suatu aset dapat diakui menjadi milik entitas apabila terbukti bahwa telah menjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung oleh bukti secara hukum.
	4. PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat tidak membedakan pengeluaran setelah perolehan menjadi pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Setiap pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan ataupun perbaikan aset tetap akan langsung di catat sebagai biaya pemeliharaan. Perlakuan ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 yang menyatakan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
	5. Dalam kebijakan akuntansi aset tetapnya, PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat telah melakukan penyusutan atas aset tetapnya. Hal ini juga telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No.16 . Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 disebutkan bahwa “selain tanah dan konstuksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
	6. Pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat, praktik penghapusan dan pelepasan aset dari penggunaannya menggunakan cara penghapusan yang ketentuan dan tata caranya mengacu pada aturan yang terdapat dalam Permrndagri no. 17 tahun 2006 dan telah di perbaharui menjadi Permendagri no 19 thn 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ( BMD ). Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, habis masa ekonomisnya, hilang, dan sebagainya.
	7. Pada kebijakan akuntansi PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat, biaya perolehan aset yang diperoleh secara gabungan akan dihitung masing-masing bedasarkan harga wajarnya. Jadi biaya perolehan setiap aset akan dihitung tersendiri bedasarkan harga wajar masing-masing aset. Namun dalam praktiknya, selama ini PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat telah melakukan perolehan aset secara gabungan. Setiap aset hanya dapat diperoleh bedasrkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disetujui.
	8. Pelaporan akuntansi aset tetapPT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat telah dilakukan sesuai dengan PSAK No.16 baik dari segi pengakuan, perolehan dengan pembelian, perolehan dengan penggabungan, perolehan dengan pertukaran, aset donasi, penerapan akuntasi penyusutan, penerapan akuntansi penghentian dan penghapuasan aset tetap dan penerapan akuntansi atas pengungkapan aset tetap dalam arti perusahaan ini dalam menata laporan keuangannya telah berpedoman pada aturan berlaku.
	9. Pengungkapan aset tetap telah sepenuhnya dilakukan oleh PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat. PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat telah mengungkapkan penilaian, penambahan, nilai penyusutan dan pelepasan aset tetap, termasuk dasar penilaian yang dugunakan untuk menentukan nilai tercatat, metode penyusutan yang di gunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode yang semuanya terurai dalam CaLK sesuai dengan ketentuan yang ada pada Standar Akuntansi Keuangan No.16 .

**Saran**

 Berdasarkan kesimpulan mengenai kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat yang telah dijelaskan di atas, penulis memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang sebagai berikut:

* 1. PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat hendaknya membedakan pengeluaran modal dengan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran yang dapat menambah masa manfaat atau dapat memberi manfaat ekonomi di masa mendatang hendaknya ditambahkan kepada nilai aset tercatat yang bersangkutan.
	2. PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat hendaknya segera melakukan penyelesaian terhadap Aset Dalam Penelusuran yang tercantum di dalam neraca 2 tahun berturut - turut, karena terlihat tidak ada nya kemajuan dalam penelusuran aset yang tidak di temukan tsb.
	3. Agar Petugas Aset dapat melakukan pendataan ulang Barang Milik Daerah ( BMD) yang dimiliki oleh PT. KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat. Hal ini untuk menghindari Kesalahan catat pada Buku Inventaris dan kehilangan yang dapat terjadi pada Barang Milik Daerah BMD ), dikarenakan jumlahnya yang sangat banyak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agussalim Manguluang, Statistik, Ekasakti Press, Padang, 2013.

Hendriksen Eldon S, *Accounting Theory*, *Fourth Edition*, Richard D. Irwin Inc, Homewood, Illinois, 2013.

Hery, Mahir Akuntansi Dasar, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi , Universitas Indonaesia, Jakarta, 2015.

Hery dan Widyawati Lekok. Akuntansi Keuangan Menengah*.* Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Horngren, Charles T, Walter T. Harrison dan Linda Smith Bamber: 2006: Akuntansi: Edisi ke enam: Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Aset>

https://dconsultingbusinessconsultant.com/aset-tetap-dalam-psak-no-16/

Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Indonesia 2015, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2017. PSAK No.16 (Revisi 2015) : Aset Tetap. IAI, Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2017. PSAK No.16 (Revisi 2018) : Aset Tetap. IAI, Jakarta.

Kieso Donald E and Jerry Weygandt, *Intermediate Accounting*, *Third Edition*, John Willey & Sons Inc, New York, 2014.

Kieso et al, Donald E., Weygandt, Jerry J,Warfield, Terry D. (2014). Alih Bahasa Emil Salim. Akuntansi *Intermediate*. Edisi ke 12, Jilid 3. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Kusnadi, et al, Teori Akuntansi, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 2013.

Krisnawati, Wiwin. 2013. Tinjauan atas Perolehan dan Penyusutan Aset Tetap Pada PT. Jamsostek Cabang Bandung I. Skripsi. Bandung.

Marisi P. Purba, S. 2013. Akuntansi Keuangan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Pahlepi, Reza 2015. Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No.16 Pada PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Lib.unnes.ac.id. Universitas Negeri Semarang 2012. http://lib.unnes.ac.id/11286/diakses 10 Maret 2017.

Rudianto. 2014. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Soemarso S. R, 2015, Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Kelima Buku Dua, Jakarta: Salemba Empat.

Surya, Raja Adri Satriawan, 2012. Akuntansi Keuangan IFRS. Edisis Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Tuanakotta Theodorus M, Teori Akuntansi, Buku Satu, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.